

**PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH
(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

SLAMET INDAH

C100110019

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH
(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

SLAMET INDAH
C100110019

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Septarina Budiwati, S.H., MH., CN.

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH
(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo)**

**OLEH
SLAMET INDAH
C100110019**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 20 November 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Septarina Budiwati, S.H., MH., CN.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, SH., MH.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati S.H., M.Hum.

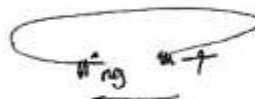
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat tulisan yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 November 2019

Yang menyatakan,



SLAMET INDAH

C100110019

PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah serta kesesuaian pelaksanaan gadai emas sistem syariah dengan kaidah hukum Islam dan prinsip syari'ah tentang rahn emas. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo. Sumber data menggunakan data sekunder berupa peraturan perundangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), fatwa MUI, serta dokumen dari perusahaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo adalah menggunakan akad Rahn dan Ijarah. Akad Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari murtahin (bank penerima gadai) untuk rahin (nasabah) yang disertai dengan penyerahan tugas agar murtahin menjaga barang jaminan yang diserahkan, rahin hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan, sedangkan biaya pemeliharaan menggunakan akad Ijarah. Adapun prosedur pelaksanaannya adalah rahin datang dan mengisi formulir permohonan gadai, penelitian kualitas emas untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan, penaksiran harga emas yang digadaikan, penerimaan permohonan gadai, penghitungan jumlah pembiayaan, biaya pemeliharaan, dan biaya administrasi, dan besaran angsuran, pencairan pembiayaan kepada rahin; Kedua, gadai emas sistem syariah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Sukoharjo telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan prinsip syari'ah tentang rahn emas. Kesesuaian dengan hukum Islam adalah dalam fikih Islam mengenal perjanjian gadai disebut "rahn", yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang (Q.S Al-Baqarah ayat 282 dan 283, hadits nabi, dan Ijma' ulama atas hukum mubah (boleh) perjanjian gadai). Kesesuaian gadai emas syariah dengan kaidah hukum Islam terletak pemenuhan rukun gadai yaitu: adanya pihak yang berakad, adanya ijab dan kabul, adanya jaminan (marhun) berupa barang atau harta, dan adanya hutang (marhun bih). Kesesuaian gadai emas syariah di BSM Cabang Sukoharjo juga sudah sesuai dengan prinsip syari'ah tentang rahn emas yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas yang intinya menyatakan: murtahin (bank) berhak menahan barang jaminan rahin (nasabah) sampai hutangnya dilunasi.

Kata Kunci: gadai emas sistem syariah, kaidah hukum Islam

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the gold pawning with the sharia system as well as the suitability of the implementation of the sharia gold pawning system with the rules of Islamic law and sharia principles regarding the golden rahn. This research is a type of normative legal research

which examines the law which is conceived as a norm or norm that applies in society. The study was conducted at Bank Syariah Mandiri Sukoharjo Branch. The data source uses secondary data in the form of laws and regulations, Compilation of Islamic Law (KHI), MUI fatwa, and documents from companies. Data analysis techniques using qualitative analysis. The results showed that: First, the implementation of the gold pawning with the syariah system in Bank Syariah Mandiri Sukoharjo Branch was using the Rahn and Ijarah contracts. Rahn contract is a loan agreement from murtahin (a pawn recipient bank) for rahin (customer) accompanied by assignment of duties so that murtahin safeguards the surrendered collateral, rahin will only be charged with administrative costs and storage service fees, while maintenance costs use the Ijarah contract. As for the implementation procedure, the womb arrives and fills out a pawn request form, researches the quality of gold to determine the value of the financing to be given, the estimated price of mortgaged gold, receipt of the pawning request, calculation of the amount of financing, maintenance fees, and administrative costs, and the amount of installments, disbursement of financing to the womb; Second, the sharia gold pawning system at the Bank of Syari'ah Mandiri Sukoharjo Branch is in accordance with the rules of Islamic law and the shari'ah principles regarding rahn Emas. Conformity with Islamic law is in Islamic Jurisprudence recognizing a pawn agreement called "rahn", ie an agreement to hold an item as a debt dependent (QS Al-Baqarah verses 282 and 283, hadith of the prophet, and Ijma 'ulama on the mubah law (may be a pawn agreement) . The suitability of the Islamic gold pawn with Islamic legal rules is the fulfillment of the pillars of the pawn, namely: the existence of a party who has the intention, the consent and the Kabul, the guarantee (marhun) in the form of goods or property, and the existence of debt (marhun bih). The suitability of the Islamic gold pawning in BSM Sukoharjo Branch is also in accordance with the sharia principle regarding gold rahn which is guided by the National Sharia Council Fatwa Council No. 41 of Indonesia. 26 / DSN-MUI / III / 2002 concerning gold rahn which basically states: murtahin (bank) has the right to hold the collateral rahin goods (customer) until the debt is repaid.

Keywords: gold pawning system of sharia, rules of Islamic law

1. PENDAHULUAN

Gadai adalah pemberian kredit kepada masyarakat dengan hukum gadai. Dimana nasabah mengambil kredit dengan membawa barang jaminan ke penggadai untuk dijadikan jaminan dengan harapan pinjaman yang diperoleh dapat digunakan untuk menambah biaya produksi, modal usaha, biaya pendidikan, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak sehingga bagi nasabah yang memiliki suatu kegiatan usaha dapat mempergunakan pinjaman tersebut (Subagyo, dkk.1999).

Barang yang memiliki nilai ekonomi dapat digadaikan atau menjadi menjadi jaminan penerima gadai. Barang yang tidak memiliki nilai ekonomi, tidak dapat dijual adalah tidak dapat digadaikan. Barang yang bisa digadaikan dapat berwujud tanah, rumah, sawah, kendaraan, perhiasan, barang elektronik, atau lainnya. Dalam hukum Islam, barang haram tidak dapat digadaikan.

Secara syariah, gadai (ar-rahn) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (kredit) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang berutang, jika tidak bisa melunasi pinjamannya. Gadai merupakan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang agar dapat dilunasi semuanya atau sebagiannya dengan harga dari jaminan tersebut” (Muhammad. 2010). Sebagai contoh, bila ada seseorang memiliki hutang sebesar lima ratus ribu rupiah dan seseorang tersebut menitipkan emas yang nilainya sekitar satu juta rupiah sebagai jaminannya. Apabila ia tidak dapat membayar utangnya, maka pinjaman dapat dilunasi dengan menjual emas yang digadaikan tersebut dan sisanya dikembalikan kepada yang berutang.

Jasa gadai diperbolehkan dalam agama Islam. Dasarnya adalah dalil Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' para ulama. Penetapan jaminan sebagai syarat utang didasarkan pada pertimbangan diperbolehkannya mengambil barang tanggungan yang dipegang sebagai jaminan. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah khususnya Ayat 283: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) (Departemen Agama RI. 1996).” Tersirat dalam ayat tersebut bahwa gadai adalah tanggungan yang dipegang oleh pemberi utang.

Hadits nabi Muhammad SAW tentang membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. *“Dari Aisyah r.a. bahwa sesungguhnya nabi Saw pernah memberi makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang nabi Saw menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu”* Kata *rahn* yang tercantum dalam ayat dan hadits di atas bisa dipahami sebagai agunan. Apabila disebut lembaga adalah pegadaian tetapi jika kata *rahn* tersebut dikaitkan dengan sesuatu produk seperti pembiayaan, jual

beli, pinjam meminjam dan sebagainya maka rahn bisa dimaknai sebagai agunan (jaminan).

Islam memang memperbolehkan gadai jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Ditinjau dari hukum Islam, jasa gadai disebut dengan *rahn* (barang jaminan) yang merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam tanpa adanya imbalan jasa. Rukun rahn ada 3 yaitu: Shighat (ijab dan qabul), Al-‘aqidan (orang yang melakukan akad ar-rahn, dan Al-ma’qud ‘alaih (barang yang digadaikan). Maish ada ketentuan tambahan yaitu qabdh (serah terima). Jika semua ketentuan sudah terpenuhi dan dilakukan oleh orang yang sehat dan layak, maka akad rahn tersebut sah (Sudarsono, 2003).

Gadai emas syariah adalah penyerahan emas secara fisik dari nasabah (penggadai) kepada pihak bank (pemberi gadai) untuk dikelola dengan prinsip ar-*Rahnu* yaitu sebagai jaminan atas pinjaman utang. Gadai emas syariah merupakan akad penyerahan emas sebagai jaminan atas utang yang diberikan oleh pihak bank kepada penggadai. Gadai emas syariah di Indonesia diselenggarakan oleh beberapa perusahaan, mulai dari BUMN Pegadaian dengan Gadai Syariah maupun bank syariah swasta (Ali. 2008).

Penerapan agunan (jaminan) emas dianggap tidak memberatkan karena beralasan, syarat adanya jaminan sudah biasa karena dimanapun setiap mengajukan pinjaman disertakan jaminan. Pemberian jaminan emas bisa dijadikan motivasi dalam pengembalian sehingga terpenuhi akad hal ini dibuktikan bahwa nasabah lebih memberikan prioritas dalam pengembaliannya terhadap pinjaman (pembiayaan) yang menggunakan jaminan.

Permasalahan jasa gadai emas syariah perlu diteliti dengan judul: “Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo).”

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimakah pelaksanaan gadai emas syariah di BSM Cabang Sukoharjo?; *Kedua*, Apakah pelaksanaan gadai emas syariah di BSM Cabang Sukoharjo sudah sesuai dengan hukum Islam dan prinsip syari’ah *rahn* emas?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan data-data sekunder atau data kepustakaan. Jenis penelitian yuridis normative yang dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum formal seperti peraturan perundang-undangan, serta literatur teoritis yang kemudian dihubungkan dengan pokok permasalahan (Marzuki. 2010).

Pelaksanaan penelitian di BSM Cabang Sukoharjo. Sumber data menggunakan data sekunder berupa peraturan perundangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), fatwa MUI, serta dokumen dari perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis normatif kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, verifikasi, dan pengambilan kesimpulan sebagai sebuah proses. Pengambilan kesimpulan tidak didasarkan atas angka-angka yang diolah dengan statistik, melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kesimpulannya diambil dengan metode deduktif yaitu membahas hal-hal yang bersifat umum menuju khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 Juni 2019 di Kantor Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sukoharjo yang beralamat di Jalan Raya Solo Permai Blok C No. 61 Solo Baru Sukoharjo, diperoleh data-data tentang prosedur, bentuk akad dari layanan gadai emas dengan sistem syariah, dan pelelangan jaminan emas. Data-data tersebut merujuk pada hasil wawancara dengan Staf Marketing Gadai Emas BSM Cabang Sukoharjo dan dokumen berupa brosur layanan gadai emas.

Layanan jasa gadai emas syariah di BSM Cabang Sukoharjo adalah produk pembiayaan atau kredit dengan jaminan berupa emas. Produk jasa gadai emas di BSM biasanya digunakan nasabah untuk biaya pendidikan, pengobatan, keperluan

hajatan, ataupun untuk modal. Di dalam brosur gadai emas BSM Cabang Sukoharjo, syarat-syarat ketentuan dan prosedur gadai emas adalah sebagai berikut (BSM, 2015): Pembiayaan mulai dari minimal lima ratus ribu rupiah sampai dengan maksimal dua ratus lima puluh juta rupiah dengan jaminan berupa emas minimal 16 karat dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan dapat diperpanjang hingga dua kali, dan sebelumnya nasabah telah memiliki rekening tabungan di BSM.

Secara garis besar pelaksanaan gadai emas syariah di Kantor BSM Cabang Sukoharjo terdiri dari prosedur penaksiran jaminan, bentuk akad, dan pelelangan jaminan emas. Tahap pertama adalah prosedur penaksiran emas: calon nasabah menyerahkan barang jaminan yang akan digadaikan untuk kemudian ditaksir terlebih dahulu oleh petugas gadai. Petugas gadai kemudian melakukan penentuan berat dan karat emas dengan metode kimia dan metode berat jenis. Langkah selanjutnya, petugas gadai kemudian menentukan nilai taksiran harga emas dan menentukan besarnya pinjaman yang dapat diberikan. Bank Syariah Mandiri menetapkan besarnya pinjaman dengan nilai taksiran = berat emas x harga emas saat ini. Maksimal yang diberikan untuk emas batangan sebesar $90\% \times$ nilai taksiran, sedangkan untuk emas perhiasan adalah sebesar $85\% \times$ nilai taksiran.

Pelaksanaan gadai emas di BSM Cabang Sukoharjo sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya rahn yaitu: (1) Adanya ijab qabul, yang dilakukan dalam bentuk tertulis; (2) Orang yang bertransaksi, yaitu antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai); (3) Adanya barang yang digadaikan, emas yang digadaikan harus memenuhi syarat; (4) *Marhun* bih (utang), utang yang dapat dijadikan gadai harus jelas dan diketahui oleh pemberi gadai *rahin* dan penerima gadai *murtahin* (BSM, 2015).

Pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keinginan masyarakat muslim yang menghendaki adanya transaksi gadai yang sesuai syariat Islam. Hal ini karena jasa gadai emas dengan sistem syariah memiliki perbedaan dengan pegadaian biasa. Pegadaian biasa menetapkan bunga yang harus dibayar penggadai, sedangkan pegadaian syariah tidak memungut bunga tetapi hanya meminta biaya penitipan,

pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran yang hanya dikenakan sekali saja (Siamat. 2001).

3.2 Kesesuaian Pelaksanaan Gadai Emas di BSM Cabang Sukoharjo dengan Hukum Islam dan Prinsip *Rahn* Emas

Berdasarkan data pelaksanaan gadai emas syariah di BSM Cabang Sukoharjo yang telah diuraikan, maka dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut: Kesesuaian pelaksanaan gadai emas di BSM Sukoharjo dengan kaidah hukum Islam; dan Kesesuaian pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di BSM Cabang Sukoharjo dengan prinsip *Rahn* emas.

Kesesuaian gadai emas syariah dengan kaidah hukum Islam. Akad gadai emas syariah yang di BSM Cabang Sukoharjo tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Dimana dalam fikih Islam mengenal perjanjian gadai disebut “*rahn*”. Kata *rahn* yang tercantum dalam ayat dan hadits dipahami sebagai agunan pada dasarnya *rahn* adalah gadai, jika disebut lembaga adalah pegadaian akan tetapi jika kata *rahn* tersebut dikaitkan dengan sesuatu produk seperti pembiayaan, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya maka *rahn* bisa dimaknai sebagai agunan (jaminan) (Muhammad. 2003).

Keseuaian gadai emas syariah dengan kaidah hukum Islam adalah pada aspek hukum perdata Islam (*fiqh mu'amalah*), dimana transaksi gadai mempersyaratkan adanya rukun dan syarat sah gadai, yaitu: adanya pihak yang berakad, adanya ijab dan kabul, adanya jaminan, dan adanya hutang yang diakui.

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut gadai emas dengan prinsip syariah di BSM Cabang Sukoharjo telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, yaitu sesuai dengan akad “*rahn*” yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang, adanya pihak yang berakad, adanya ijab dan kabul, adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta, serta adanya hutang (*marhun bih*).

Kesesuaian pelaksanaan gadai emas di BSM Cabang Sukoharjo dengan prinsip *rahn* emas. Akad transaksi gadai emas syariah di BSM cabang Sukoharjo telah sesuai dengan prinsip syariah, hal ini ditinjau dari beberapa hal, meliputi: Subyek perjanjian gadai adalah *rahin* (pihak atau orang yang menggadaikan

barang) dan *murtahin* (pihak bank yang menerima gadai). Obyeknya ialah *marhun* (yaitu emas sebagai barang gadai) dan utang yang diterima penggadai (*rahin*).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, gadai emas syariah di BSM Cabang Sukoharjo dilaksanakan dengan menggunakan akad *Rahn* dan *Ijarah*. Akad *Rahn* adalah pemberian pinjaman dari *murtahin* (bank penerima gadai) kepada *rahin* (nasabah) disertai penyerahan tugas agar *murtahin* menjaga barang jaminan jaminan, *rahin* dibebani biaya administrasi dan jasa simpan, sedangkan biaya pemeliharaan menggunakan akad *Ijarah*. Adapaun prosedur pelaksanaannya adalah *rahin* datang dan mengisi formulir permohonan gadai, penelitian kualitas emas untuk menaksir jumlah pembiayaan yang diberikan, penaksiran harga emas, penerimaan permohonan gadai, penghitungan jumlah pembiayaan, biaya pemeliharaan, dan biaya administrasi, dan besaran angsuran, pencairan pembiayaan kepada *rahin*.

Kedua, Kesesuaian gadai emas syariah di BSM Cabang Sukoharjo dengan hukum Islam dan prinsip *rahn* emas. Kesesuaian dengan hukum Islam adalah dalam fikih Islam mengenal perjanjian gadai disebut “*rahn*”, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang (Q.S Al-Baqarah ayat 282 dan 283, hadits nabi, dan *Ijma'* ulama atas hukum *mubah* (boleh) perjanjian gadai). Kesesuaian gadai emas syariah dengan kaidah hukum Islam terletak pemenuhan rukun gadai yaitu: adanya pihak yang berakad, adanya ijab dan kabul, adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta, dan adanya hutang (*marhun bih*). Kesesuaian dengan prinsip *rahn* emas berpedoman pada Fatwa DSN MUI No. 26/III/2002 tentang *rahn* emas.

4.2 Saran

Pertama, Pihak bank perlu mensosialisasikan dan mempromosikan bahwa jasa gadai emas sudah sesuai dengan syariat Islam dan prinsip syari'ah. Hal ini dilakukan agar lebih banyak masyarakat muslim yang menjadi nasabah gadai emas syariah.

Kedua, Penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas hendaknya lebih memperhatikan aturan yang ditetapkan dalam fatwa MUI. *Ketiga*, Bagi masyarakat, menjadi nasabah *rahin* jasa gadai syariah dapat menjadi solusi untuk memperoleh pinjaman dengan jalan yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- BSM. (2015). *Brosur Gadai Emas*. BSM Cabang Sukoharjo.
- Bukhari dan Muslim. Kitab Nailul Authar Jilid 4
- Dahlan, Siamat. (2001). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Departemen Agama RI. (1996). *Al qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Syaikh. (2010). *Syarhu Al-Mumtithi 'Ala Zadi Al-Mustaqni'*, Majalah Pengusaha Muslim Edisi. IX/118 Volume 1 Tahun 2010
- Muhammad. (2003). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.: 78
- Subagyo, dkk. (1999). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sudarsono, Heri. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.